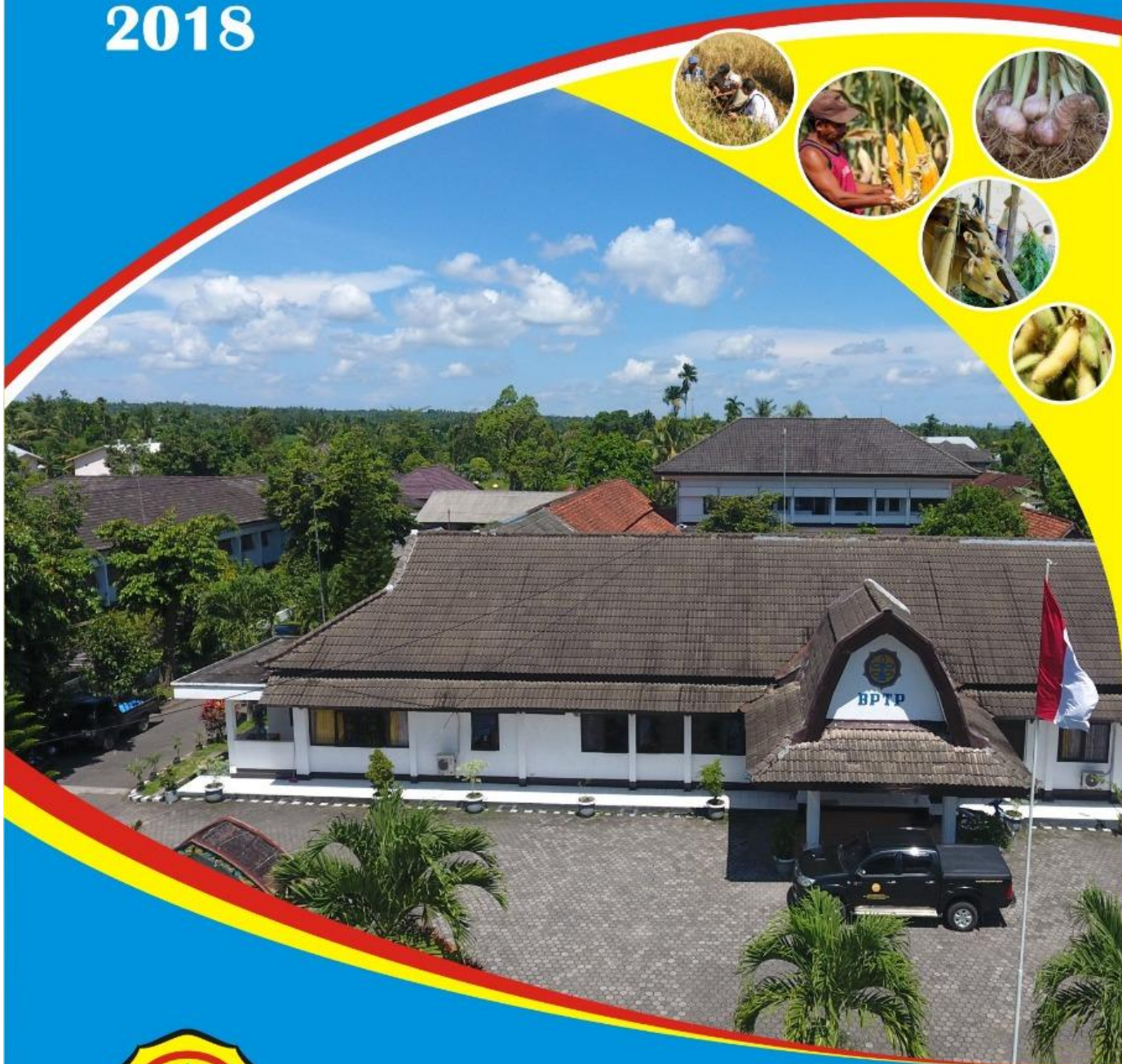


LAPORAN KINERJA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT 2018



**BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB
BADAN LITBANG PERTANIAN
2018**

LAPORAN KINERJA

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT 2018



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB
BADAN LITBANG PERTANIAN
2018**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nyalah Laporan Kinerja ini dapat kami selesaikan. BPTP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, BPTP NTB berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini yang memuat kinerja BPTP NTB pada TA. 2018, dan merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian LAKIP ini. Disadari bahwa LAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritikan untuk penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Namun demikian, diharapkan semoga LAKIP ini berguna bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberi manfaat bagi penyelenggara kinerja BPTP NTB pada masa yang akan datang.

Mataram, 31 Desember 2018
Kepala Balai,



Dr. Ir. M. Saleh Mokhtar, MP
NIP. 19660707 199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berada di daerah. Secara administratif berada dalam koordinasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Berdasarkan Permentan No.19/Permentan/OT.020/ 5/2017; BPTP diberi tugas untuk melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi, setiap UK/UPT memiliki *standar performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen dalam pelaksanaan tupoksi dan fungsi organisasi dengan baik. Standar performance tersebut tertuang dalam rencana kinerja tahunan Balai yang perlu diukur tingkat capaian kerjanya pada setiap akhir tahun berjalan. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BPTP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Operasional Kegiatan BPTP NTB 2015-2019. Secara umum tingkat capaian kinerja BPTP NTB tahun 2018 menunjukkan performance yang baik.

Kinerja balai juga terlihat dari capaian realisasi belanja sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Hingga 31 Desember 2018, realisasi keuangan satker BPTP NTB mencapai Rp. 57.164.153.256 (62,23%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2018 sebesar Rp 91.864.403.000. Dari masing-masing jumlah belanja, realisasi belanja yang paling besar serapannya adalah belanja non operasional sebesar Rp. 43.599.141.438 (56,82%), kemudian anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 7.389.286.286, (96,53%) belanja modal Rp 4.799.072.048 (78,84%) dan anggaran belanja operasional sebesar Rp. 1.376.653.484 (99,24%).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
1.4. Sumberdaya Manusia	7
1.5. Dukungan Anggaran	11
II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Renstra Balai	12
2.2. Kebijakan, Program dan Kegiatan BPTP NTB Tahun 2018	13
2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018	17
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan	19
3.2. Pencapaian Kinerja Keseluruhan	20
3.3. Evaluasi Kinerja Untuk Setiap Sasaran Kegiatan	21
IV. PENUTUP	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perkembangan Tenaga PNS BPTP NTB Tahun 2013-2018	8
Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional BPTP NTB Tahun 2013-2018	9
Tabel 3. Rencana Kinerja BPTP NTB Tahun 2018	17
Tabel 4. Penetapan Kinerja BPTP NTB Tahun 2018	18
Tebel 5. Tingkat Capaian Kinerja BPTP NTB Tahun 2018	20

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gbr 1. Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB berdasarkan Permentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017	4
Gbr 2 Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB berdasarkan SK Kepala Balai No. 01/OT.050/H.12.17/01/2018 tanggal 02 Januari 2018	6
Gbr 3 Keragaan Pegawai BPTP NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2018	9
Gbr 4 Keragaan Pegawai BPTP NTB Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2013 sampai dengan 2018	10

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lamp 1. Rencana Operasional	45
Lamp 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	50
Lamp 3. Rincian Revisi DIPA TA 2018	68

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dengan demikian diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai perundangan-undangan.

Upaya tersebut sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara, dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Terbitnya Inpres tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Badan Litbang Pertanian sebagai salah satu organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Pertanian, dalam era globalisasi pembangunan pertanian yang dinamis membutuhkan adanya inovasi. Sebagai lembaga penelitian dan pengembangan pertanian, Badan Litbang Pertanian mencoba memecahkan permasalahan strategis tersebut melalui penelitian dan pengembangan inovasi tepat guna spesifik lokasi.

BPTP sebagai ujung tombak Badan Litbang di daerah dalam melaksanakan tugasnya, secara umum melaksanakan penelitian komoditas, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Secara khusus, tujuan dibentuknya BPTP adalah: (1) Mengeksplorasi, mengidentifikasi, meningkatkan manfaat sumber daya alam, sosial, dan potensi sumber daya genetik spesifik lokasi; (2) Menghasilkan model pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan daerah, agroekosistem, dan atau wilayah didukung inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi; (3) Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk pertanian unggulan daerah;

(4) Menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial, ekonomi, dan rekayasa kelembagaan dalam rangka mengembangkan usaha dan sistem agribisnis unggulan daerah; (5) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia BPTP NTB, dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya ethos kerja tinggi, berhatinurani, berintegritas dan bermoral.

Program penelitian dan pengkajian pada dasarnya adalah program-program penelitian terapan yang bersifat adaptif sampai kepada pengkajian SUT dan agribisnis. Sebagian besar kegiatan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh petani di bawah bimbingan peneliti dan penyuluh pertanian. Dengan demikian, program-program penelitian tersebut harus disesuaikan dan mudah dikerjakan petani. Program penelitian ini bisa berupa introduksi teknologi baru, modifikasi atau perbaikan dari teknologi yang sudah biasa dikerjakan oleh petani.

Strategi penyusunan program penelitian BPTP NTB bisa dikaji dari aspek sumber teknologi yang akan diolah untuk keperluan petani atau pengguna teknologi. Sumber yang bersifat "*top-down*" dihasilkan dari institusi penelitian dan sumber-sumber teknologi lainnya. Sumber teknologi "*bottom-up*" merupakan teknologi yang berasal dari petani berupa teknologi-teknologi konvensional, tradisional, berupa "*indigeneous technology*". Kedua sumber teknologi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan demikian perlu strategi khusus dalam meramu dan merakit teknologi dari kedua sumber tersebut secara lebih tepat. Pada dasarnya teknik perakitan teknologi, uji-coba dan pengkajian serta penyebar-luasan teknologi dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi petani merupakan kunci kesuksesan alih teknologi.

Untuk merealisasikan apa yang menjadi tugas dan fungsi tersebut di atas perlu mengakomodir kebutuhan daerah yang merupakan mitra kerja utama dari BPTP NTB, yang tercermin dalam Rencana Strategis Pemerintah Propinsi NTB, dalam hal ini melalui Dinas Teknis terkait (pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan dan penyuluhan), juga harus mempertimbangkan Rencana Strategis instansi vertikalnya (Badan Litbang Pertanian dan Rencana Aksi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian) serta Rencana Operasional BPTP NTB sendiri.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, BPTP NTB dilengkapi dengan perangkat organisasi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 01/OT.10/I.12.17/01/2018 tanggal 02 Januari 2018. (Gambar 2). Dengan perangkat organisasi ini diharapkan BPTP NTB dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

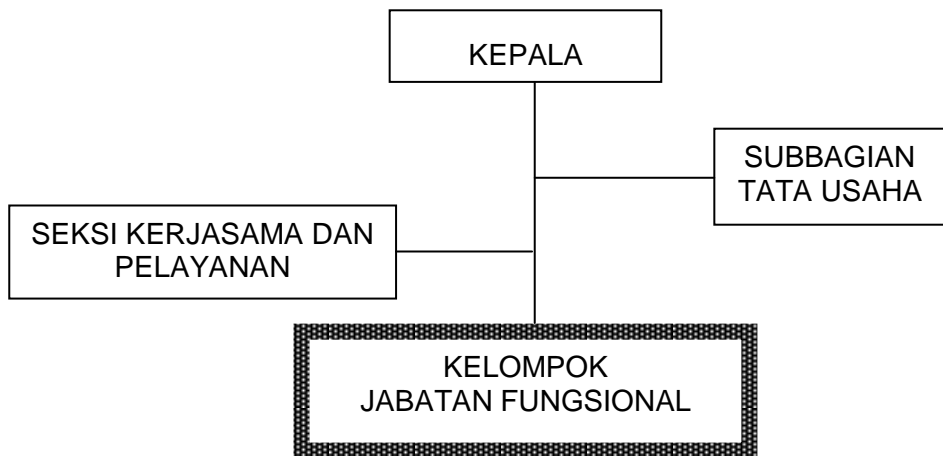
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang berada di daerah. Secara administratif berada dalam koordinasi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017, BPTP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPTP menyelenggarakan fungsi: a) Melaksanakan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; b) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; c) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; d) Melaksanakan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; e) Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; f) Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan, dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; g) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; h) Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; i) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

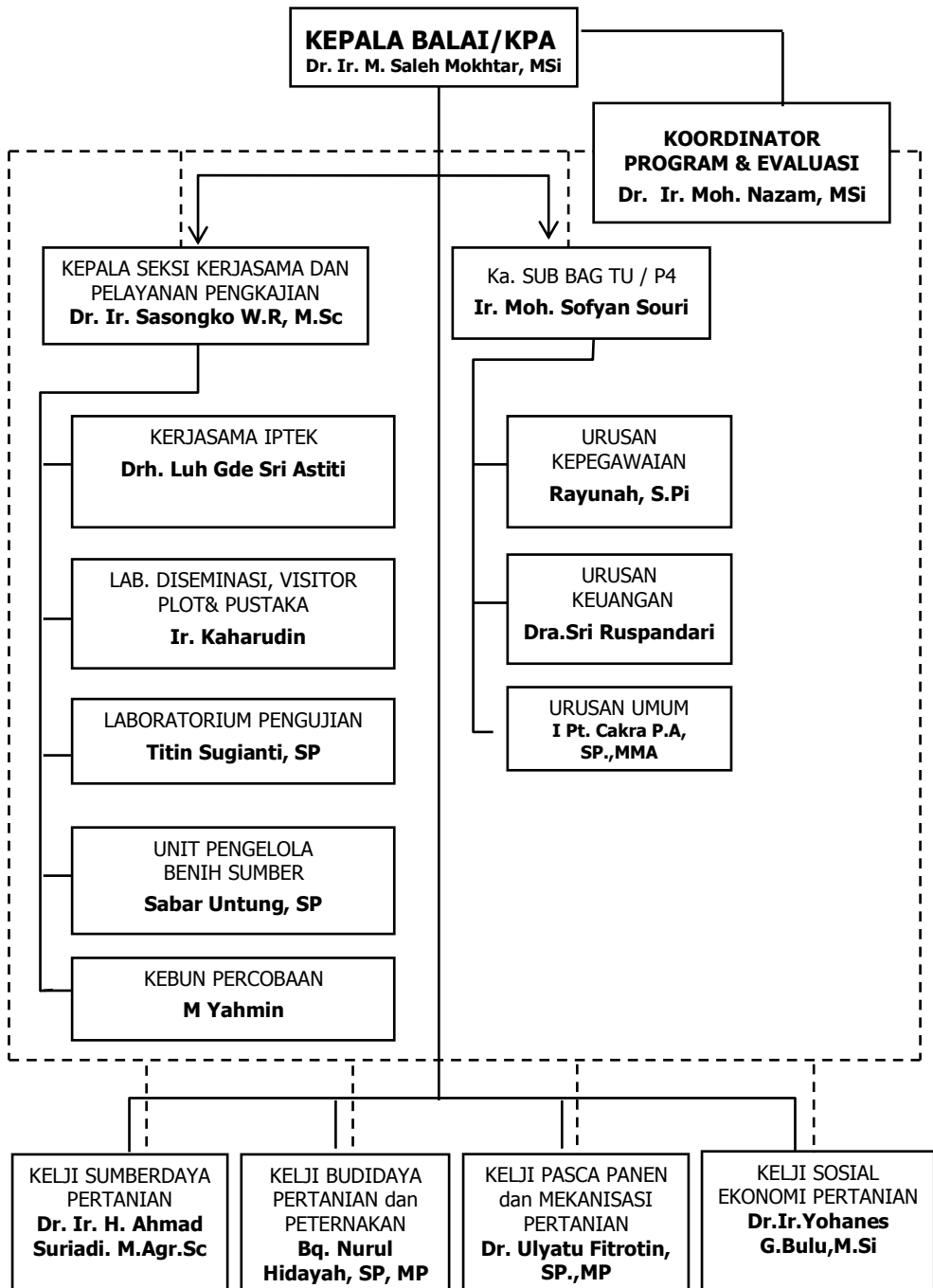
Dalam Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.020/5/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, BPTP dipimpin oleh seorang Kepala Balai setingkat Eselon IIIA, dibantu oleh 2 unit struktural setingkat Eselon IVA, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, serta Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian. Selain itu, dalam memudahkan koordinasi kegiatan litkaji dan diseminasi yang dilaksanakan Balai, BPTP NTB juga didukung oleh 4 Kelompok Pengkajia (Kelji). Ke-empat kelompok tersebut adalah Kelji Budidaya, Sumberdaya, Pascapanen, dan Sosial Ekonomi Pertanian. Adapun Struktur Organisasi Balai sesuai Permentan No.19/Permentan/OT.020/5/2017 disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB

Untuk mengakomodasikan berbagai kegiatan strategis, maka dibentuk unit organisasi internal BPTP NTB mengacu pada SK Kepala Badan Litbang Pertanian No.OT.130.95.2003 tanggal 31 Desember 2003, tentang Pembentukan Kelembagaan Internal pada UK/UPT di Lingkungan Badan Litbang Pertanian. Pembentukan unit kelembagaan internal BPTP NTB bertujuan menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional. Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi BPTP NTB maka ditetapkan Struktur Organisasi, Personalia serta Uraian Tugas dan Tanggungjawab Personalia Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian NTB TA 2018 sesuai dengan SK Kepala Balai Nomor 01/OT.050/H.12.17/01/2018 tanggal 02 Januari 2018. Dalam SK tersebut dibentuk Unit Program dan Evaluasi yang dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki jabatan fungsional tertentu (peneliti/penyuluh), serta bagian Kerjasama IPTEK untuk mengakomodasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja BPTP dan kerjasama IPTEK baik dalam maupun luar negeri. Unit-unit kerja ini dijabarkan lebih lanjut menjadi sub unit yang lebih kecil sesuai dengan bidang/urusan yang ditangani, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi BPTP NTB berdasarkan SK Kepala Balai No. 01/OT.050/H.12.17/01/2018 tanggal 02 Januari 2018

1.4. Sumberdaya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Litbang Pertanian khususnya BPTP NTB berkewajiban melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang telah diimplementasikan secara nasional baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumberdaya manusia.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, BPTP NTB telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mulai tanggal 27 September 2010 dan terakhir diperbaharui sesuai standar ISO 9001:2015 pada 26 September 2019. Sesuai dengan semangat reformasi dan perubahan birokrasi setiap UK/UPT dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, konsisten dan komitmen terhadap mutu pelayanan dan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan baik. Dalam memenuhi hal tersebut, BPTP NTB memerlukan sistem manajemen mutu dalam bidang pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada *stakeholders*.

Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan kultur dalam bekerja, salah satunya berupa disiplin kehadiran dengan mentaati jam kerja. Pelaksanaan disiplin bagi pegawai negeri sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 butir 11 yang menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja.

Secara rinci komitmen Kementerian Pertanian terhadap reformasi dan komitmen terhadap PP 53 tahun 2010 lebih detail disusun dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang pedoman peningkatan disiplin pegawai. Pada intinya PNS sebagai abdi Negara diharapkan dapat memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang dapat menginisiasi terciptanya budaya kerja yang efisien, hemat, disiplin tinggi dan anti KKN. Dengan budaya kerja yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif serta

sumber daya PNS yang kompeten maka diharapkan dapat memberikan korelasi positif terhadap pelayanan publik yang bersifat *acceptable, applicable*, dan *accountable* yang pada akhirnya dapat menciptakan *good and clean governance* sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Selain hal tersebut prinsip pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dalam Permentan No. 06/PERMENTAN/OT.140/1/2010 menjelaskan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (obyektif, transparan, institusional), partisipatif (melibatkan berbagai pihak terkait), berorientasi pembinaan (perbaikan sistem, metode, perilaku), mengutamakan pendekatan *reward* dan *punishment* yang bersifat edukatif.

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2018, Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPTP NTB terhitung sebanyak 101 orang. Jumlah pegawai pada tahun 2018 berkurang 6 orang dibandingkan jumlah pegawai pada akhir tahun 2017 sebanyak 107 orang, hal ini dikarenakan 1 orang meninggal dunia atas nama Sahnun, dan 5 orang memasuki masa purna tugas yaitu Suhaini, Zulkarnain, Ir. Achmad Muzani, Sudar, dan Drs. Sukiman.

Jumlah dan perkembangan PNS BPTP NTB berdasarkan tingkat pendidikan, dan jumlah PNS berdasarkan pangkat, golongan dan jabatan disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

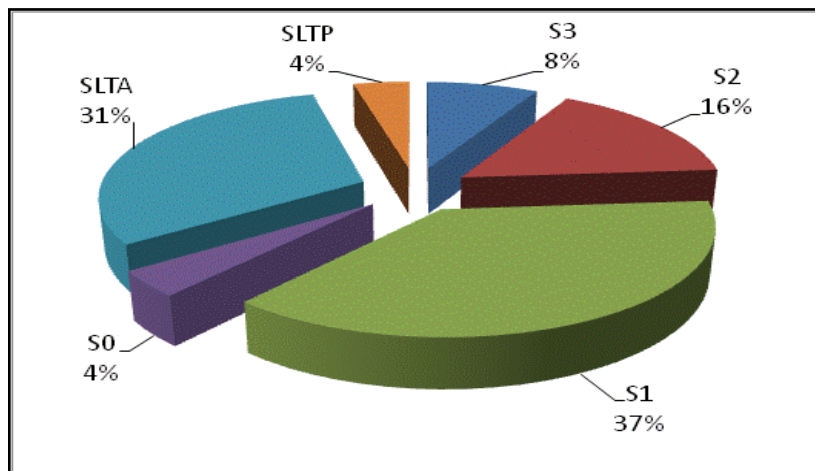
Tabel 1. Perkembangan Tenaga PNS BPTP NTB berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2013 – 2018

Tahun	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	S0	SLTA	SLTP	SD	
2013	7	14	44	4	42	5	2	118
2014	8	15	42	5	39	5	2	116
2015	6	16	42	4	38	5	2	113
2016	9	15	44	4	32	6	2	113
2017	8	16	40	4	33	5	1	107
2018	8	16	38	4	31	4	-	101

Sumber : Data Simprog BPTP NTB, 2018

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BPTP NTB tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 mengalami kemajuan namun dari sisi jumlah mengalami pengurangan, yaitu dari 118 orang pada tahun 2013 menjadi

101 orang pada tahun 2018. Pengurangan jumlah pegawai tersebut disebabkan karena pensiun dan karena meninggal dunia. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPTP NTB didominasi oleh S1 dan SLTA masing-masing 42% dan 31%, sedangkan S2 16%, S3 8%, sementara SLTP hanya 4% dan SD tidak ada (Gambar 3). Saat ini masih terdapat tenaga BPTP NTB yang sedang menempuh tugas belajar, yaitu 1 orang jenjang S3, dan 2 orang S2 dan izin belajar S2 sebanyak 2 orang.



Gambar 3. Persentase Pegawai BPTP NTB berdasarkan Tk. Pendidikan 2018.

Proporsi tenaga fungsional tertentu dan fungsional umum relatif tidak banyak berbeda dari tahun sebelumnya. Keragaan pegawai BPTP NTB berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 2.

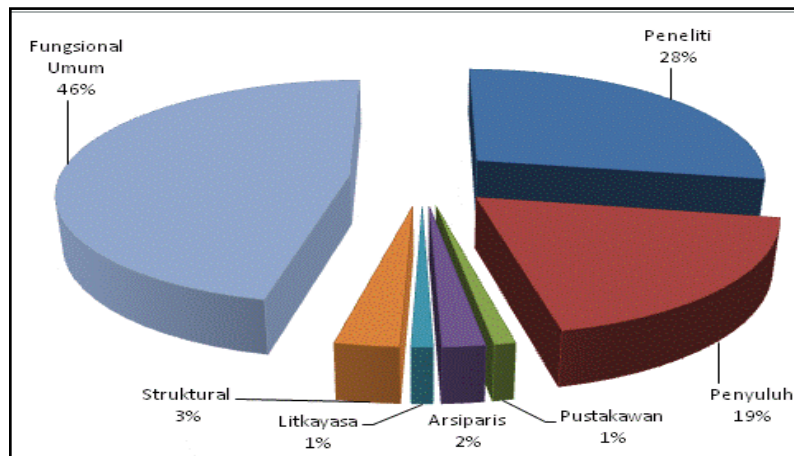
Tabel 2. Perkembangan Jabatan Fungsional BPTP NTB Tahun 2013-2018

Tahun	Jabatan							Fungsional Umum	Jumlah
	Peneliti	Penyuluh	Pustakawan	Arsiparis	Litkayasa	Struktural			
2013	30	26	2	1	1	3	55	118	
2014	23	20	2	2	1	3	65	116	
2015	27	19	2	2	1	3	59	113	
2016	31	20	1	2	1	3	55	113	
2017	29	20	1	2	1	3	51	107	
2018	28	19	1	2	1	3	47	101	

Sumber : Data Simprog BPTP NTB, 2018

Tabel 2 memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai BPTP NTB memiliki jabatan fungsional baik peneliti, penyuluh dan fungsional lainnya. Pada

tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah peneliti sebanyak 1 orang disebabkan karena memangku jabatan struktural dan penyuluh berkurang satu orang karena pensiun atas nama Ir. Achmad Muzani. Persentase pejabat fungsional BPTP NTB tahun 2018, disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Keragaan Pegawai BPTP NTB Berdasarkan Jabatan Fungsional 2018

Dari jumlah pegawai BPTP NTB tahun 2018 sebanyak 101 orang, 3 orang merupakan pejabat struktural (Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kasie Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian). Pejabat fungsional berjumlah 51 orang, terdiri atas 28 orang Peneliti, 19 orang Penyuluh, 1 orang Pustakawan, 2 orang Arsiparis dan 1 orang Litkayasa. Fungsional umum sebanyak 54 orang. Jumlah pejabat fungsional tertentu berkurang sebanyak 1 orang karena memasuki masa purna tugas yaitu Bapak Ir. Achmad Muzani

Berdasarkan jenjang jabatannya, jumlah pemangku jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional di BPTP NTB pada tahun 2018, adalah: Peneliti Ahli Madya (6 orang), Peneliti Ahli Muda (10 orang), dan Peneliti Ahli Pertama (12 orang). Penyuluh Pertanian Madya (1 orang), Penyuluh Pertanian Muda (6 orang), dan Penyuluh Pertanian Pertama (12 orang), Pustakawan Pelaksana Lanjutan (1 orang), Arsiparis Ahli Pertama (2 orang) serta Litkayasa Penyelia (1 orang).

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai BPTP agar tetap selaras dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sejumlah pegawai diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan maupun magang, yang biayanya bersumber dari DIPA BPTP NTB.

Sampai dengan akhir Desember 2018 jumlah PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar sebanyak 3 orang, yang terdiri atas: pendidikan S3 di Universitas Brawijaya Malang 1 orang (Awaludin, SP., MSi), dan pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada 1 orang (Yurista Sulistiawati, SP) serta Universitas Brawijaya 1 orang (Yuli Yarwati, SP). Selain itu terdapat 2 orang pegawai yang mengikuti ijin belajar menempuh pendidikan S2 atas biaya sendiri di Universitas Mataram (Yuliana Susanti, SP dan Darwis, SP).

1.5. Dukungan Anggaran

Pagu awal BPTP NTB pada TA. 2018 adalah senilai Rp. 25.990.619.000. Dalam perjalanan kegiatan di tahun anggaran 2018, terjadi 6 (enam) kali revisi anggaran yaitu: 1) Revisi Administrasi, kesalahan lokasi KPPN, pada 13 February 2018 dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.25.990.619.000,-**; 2) Penambahan pagu untuk pengadaan roda 4 senilai Rp 339.889.000,- serta Pembangunan dan renovasi kandang ayam KUB senilai Rp 200.000.000,- pada 02 Mei 2018 sehingga total pagu menjadi **Rp 26.530.508.000,-**; 3) Refokussing anggaran senilai Rp 5.320.311.000,- dan penambahan Pagu Program #Bekerja senilai Rp 70.080.360.000,- serta Pendampingan kegiatan Program #Bekerja senilai Rp 225.000.000 pada 04 Juli 2018 sehingga total pagu menjadi **Rp 91.515.557.000,-**; 4) Revisi perbaikan detail dan Akun Belanja untuk optimalisasi realisasi anggaran program #Bekerja pada 06 November 2018; 5) Revisi ralat halaman III DIPA pada 30 November 2018; 6) Revisi hibah luar negeri langsung (ACIAR) senilai Rp 348.846.000,- pada 18 Desember 2018 sehingga total pagu menjadi **Rp 91.864.403.000,-**. Dengan adanya 6 (enam) kali revisi tersebut, pagu anggaran BPTP NTB hingga akhir TA. 2018 yaitu sebesar Rp. 91.864.403.000. Rincian pagu dan realisasi anggaran TA 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Renstra Balai

Visi dan Misi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis Eselon III Balitbangtan yang secara hirarkis merupakan Bussines Unit Balitbangtan melalui koordinasi BB Pengkajian. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, maka BPTP NTB menyusun Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan rencana Kegiatan Litkaji, yang selanjutnya dituangkan menjadi Rencana Strategis BPTP NTB. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan Balitbangtan 2015-2019 menjadi acuan visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja Balitbangtan, termasuk BPTP NTB. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi, misi, tujuan dan sasaran BPTP NTB, sebagai berikut:

Dalam melaksanakan program-program yang diformulasikan dalam Revisi 1 Rencana Strategis BPTP NTB tahun 2015-2019, maka visi BPTP NTB kedepan adalah :

"Menjadi Lembaga Pengkajian Penghasil Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi di Nusa Tenggara Barat Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"

Sedangkan misi BPTP NTB untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian Spesifik Lokasi (NTB) yang memiliki *scientific and impact recognition* dengan produktivitas dan efisiensi tinggi
2. Mewujudkan BPTP NTB sebagai Institusi yang mengedepankan transparansi, profesionalisme dan akuntabilitas

Tujuan, Tata Nilai dan Sasaran

Berdasarkan visi, misi balai pada program penelitian/pengkajian yang tertuang dalam Revisi 1 Renstra BPTP NTB, bertujuan:

1. Menyediakan teknologi inovasi pertanian spesifik lokasi yang produktif dan efisien serta ramah lingkungan yang siap dimanfaatkan oleh stakeholder (pengguna).
2. Mewujudkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pelayanan jasa dan informasi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BPTP NTB menganut beberapa tata nilai yang menjadi pedoman dalam pola kerja dan mengikat seluruh komponen yang ada di Balitbangtan. Tata nilai tersebut antara lain:

- 1) BPTP adalah lembaga yang terus berkembang dan merupakan *Fast learning organization*.
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas kerja.
- 3) Menjunjung tinggi integritas lembaga dan personal sebagai bagian dari upaya mewujudkan *corporate management* yang baik.
- 4) Bekerja secara cerdas. cermat. keras. ikhlas. tuntas dan mawas.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari implementasi program-program penelitian/pengkajian yang tertuang dalam Revisi 1 Renstra BPTP NTB adalah:

1. Dimanfatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi
2. Meningkatnya kualitas layanan publik BPTP NTB.

2.2. Kebijakan, Program dan Kegiatan BPTP NTB Tahun 2018

Sebagai UPT Badan Litbang Pertanian di daerah, BPTP NTB banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, baik lokal, regional, maupun nasional, dan bahkan internasional, mengingat makin canggihnya komunikasi dan transportasi di era globalisasi seperti sekarang ini. Beberapa isu strategis yang terkait dengan tupoksi dan mandat BPTP NTB antara lain adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan nasional dan daerah, percepatan dan perluasan adopsi, kemasan hasil pengkajian untuk penyusunan kebijakan, biaya input relatif mahal, akses benih, perubahan iklim, ketahanan pangan di lahan marginal
2. Diseminasi hasil litkaji pertanian yang belum efektif, rendahnya nilai tukar petani, dan pengentasan kemiskinan.
3. Era otonomi daerah memberikan peluang kabupaten/kota menentukan sendiri program prioritas dan kebijakan-kebijakan, termasuk di sektor pertanian, memerlukan sinergi program yang lebih baik.
4. Dinamika masyarakat di daerah dan makin canggihnya komunikasi dan arus informasi membuka peluang makin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan teknologi pertanian.

Isu-isu strategis di atas membuka peluang, tantangan, dan bahkan mungkin juga ancaman untuk pelaksanaan kegiatan pengkajian, perakitan teknologi dan diseminasi yang menjadi mandat BPTP. Peluang, tantangan dan ancaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang amat penting bagi BPTP dengan stakeholder, terutama Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi wahana kerjasama dan integrasi program pembangunan pertanian supaya lebih efisien, efektif, dan terarah.
2. Kebutuhan teknologi di wilayah kerja BPTP NTB harus didasarkan atas kebijakan nasional, daerah, dan kebutuhan pengguna teknologi (petani, dunia usaha, dan masyarakat luas).
3. Dinamika global, regional, dan lokal menuntut penyediaan teknologi yang lebih tepat.
4. Kerjasama dengan swasta dan luar negeri menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan pendanaan APBN yang terbatas, alternatifnya dengan sharing budget.

Berdasarkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, strategi utama yang ditempuh oleh BPTP untuk melaksanakan tupoksinya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pengkajian dan diseminasi.
2. Mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif untuk menghasilkan inovasi pertanian yang bermutu dan berdaya saing.
3. Mengembangkan sistem pengkajian yang berorientasi pada dampak untuk pembangunan pertanian (*Managing research's impacts for Agricultural Development*).
4. Mengidentifikasi dan mengembangkan *core businesses* (Keunggulan) BPTP NTB.
5. Membangun dan meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta, Luar Negeri, maupun fihak lain dalam rangka menggalang pendanaan.
6. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam kegiatan pengkajian dan diseminasi.
7. Meningkatkan efektivitas kerjasama dengan Puslitbang/BB/Balit nasional.
8. Menajamkan prioritas kegiatan dalam rangka efisiensi, efektifitas, namun tetap dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan.
9. Membangun dan mengembangkan sistem kompetisi dalam penetapan proposal pengkajian dan diseminasi hasil-hasil pengkajian.

Mengacu pada kebijakan umum penelitian dan pengembangan pertanian yang telah dirumuskan dalam Renstra Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 2015 – 2019, maka BPTP menetapkan kebijakan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian sebagai berikut:

1. Peningkatan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/ referensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah
2. Peningkatan kuantitas/ kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian

3. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian
4. Peningkatan efektivitas manajemen institusi
5. Peningkatan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.

Indikator Keberhasilan Capaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang dilakukan BPTP NTB adalah: masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator pencapaian tujuan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input yang digunakan oleh BPTP NTB meliputi antara lain dana, sumberdaya manusia (SDM) atau peneliti/penyuluh yang melaksanakan kegiatan serta inovasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian.
- b. Keluaran(output) adalah produk yang merupakan hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Keluaran yang dihasilkan oleh BPTP NTB umumnya berupa program/rencana, informasi/bahan diseminasi, database, paket teknologi, maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan pada *stakeholder* (Badan Litbang Pertanian, BBP2TP, Lembaga/Instansi terkait dan petani).
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan dari masing-masing dari masing-masing kegiatan BPTP bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kegiatan tersebut. Hasil kegiatan dan

- pengkajian serta diseminasi yang dihasilkan oleh BPTP NTB umumnya dirasakan langsung oleh pengambil kebijakan maupun stakeholder lainnya.
- d. Manfaat adalah kegunaan dari suatu keluaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna.
 - e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018

Sebagai lembaga pengkajian teknologi pertanian, pada tahun anggaran 2018 BPTP NTB telah mengusulkan beberapa kegiatan pengkajian dan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian. Perencanaan kegiatan Tahun 2018 tersebut mengacu pada RENSTRA Badan Litbang Pertanian dan BBP2TP. Adapun rencana kinerja BPTP NTB Tahun 2018 disajikan dalam tabel 1.

Tabel 3. Rencana Kinerja BPTP NTB Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 Paket teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan	100%
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 Rekomendasi kebijakan
2.	Meningkatnya kualitas layanan public di BPTP NTB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	3 Nilai IKM

Perencanaan kegiatan tersebut kemudian akan dicapai melalui beberapa judul kegiatan pengkajian dan kegiatan diseminasi serta manajemen yang terdiri dari 5 RPTP, 23 RDHP, serta 2 RKTU. Lokasi kegiatan tersebut tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota di NTB.

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari BPTP NTB dan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2018, BPTP NTB telah mengimplementasikan program pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian melalui kegiatan-kegiatannya sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditargetkan. Penetapan kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 4. Penetapan Kinerja BPTP NTB Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 Paket teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan	100%
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 Rekomendasi kebijakan
2.	Meningkatnya kualitas layanan public di BPTP NTB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	3 Nilai IKM

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja BPTP NTB pada tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, bahwasanya ada 2 (dua) sasaran utama yang akan dicapai. Sasaran utama ini selanjutnya dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian kinerja yang terlihat dari realisasi hingga akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai dengan baik.

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu acuan standar kinerja Balai dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya. Dengan demikian hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan mampu memberi gambaran kinerja penyelenggaraan kegiatan BPTP NTB di Tahun 2018. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Tahun 2018, maka digunakan scoring yang mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian kinerja >100%); 2) berhasil (capaian kinerja 80% - 100%); 3) cukup berhasil (capaian kinerja 60% - <80%); dan 4) kurang berhasil (capaian kinerja <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan Balai.

Indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja bersumber dari dua jenis indikator yaitu indikator proses/aktivitas (*lead indicator*) dan indikator output/outcome (*lag indicator*). Indikator proses/aktivitas (*lead indicator*), merupakan indikator yang pencapaiannya ada dibawah kendali organisasi/Balai. Sedangkan indikator output/outcome (*lag indicator*) merupakan indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi/Balai. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian

negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, dimana pada jenjang eselon I dan eselon II menggunakan jenis indikator output/outcome. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indikator kinerja yang diukur untuk melihat capaian kinerja BPTP menggunakan *lag indicator*.

3.2. Pencapaian Kinerja Keseluruhan

BPTP NTB mengacu pada renstra badan litbang pertanian dan BBP2TP tahun 2015 – 2019, menetapkan standar kinerja pada awal tahun 2018. Standar kinerja tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) BPTP NTB yang telah ditandatangani oleh Kepala BBP2TP. Sejalan dengan perjalanan waktu, terdapat revisi Perjanjian Kinerja (PK) BPTP NTB terkait dengan anggaran kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), serta target kinerja yang akan dicapai dalam Tahun 2018.

Penilaian evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, selain itu juga akan mencari permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi standar yang telah ditargetkan Balai. Mempelajari capaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun 2018 dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memperbaiki kinerja Balai, dengan harapan terjadi peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Rincian tingkat pencapaian kinerja BPTP NTB Tahun 2018 dari masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan dalam table 3.

Tabel 5. Tingkat Capaian Kinerja BPTP NTB Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kategori
1.	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 Paket teknologi	13 Paket teknologi	Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kategori
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan	100%	100%	Berhasil
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas layanan public di BPTP NTB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB	3 Nilai IKM	3 Nilai IKM	Berhasil

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, pencapaian kinerja BPTP NTB Tahun 2018 masuk dalam kategori **berhasil**. Secara umum tingkat capaian kinerja BPTP NTB TA. 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan balai sebagian besar telah tercapai bahkan tingkat capaian beberapa kegiatan melebihi target yang sudah ditentukan dalam tahun berjalan.

3.3. Evaluasi Kinerja Untuk Setiap Sasaran Kegiatan

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan tiga indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (paket teknologi)	13	13	100
Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan (%)	100	100	100
Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan (Rekomendasi kebijakan)	1	1	100

Sasaran kinerja 1 dicapai melalui 3 indikator kinerja yaitu : 1) jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan; 2) Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan; dan 3) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Indikator kinerja pertama dicapai melalui beberapa kegiatan Balai. Capaian tersebut merupakan akumulasi paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan dalam 5 tahun terakhir. Target ini dapat terealisasi sebanyak 13 paket teknologi atau sebesar 100%. Kegiatan tersebut berasal dari kegiatan

pengkajian dalam DIPA BPTP NTB dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Adapun output dari kegiatan DIPA tersebut adalah :

1) Teknologi Penyediaan Pakan Ternak Ruminansia

- Kegiatan pengkajian terkait Penyediaan Pakan Ternak Ruminansia dilaksanakan untuk mendukung Kawasan Peternakan Di NTB. Pelaksanaan kegiatan yaitu di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Hasil yang dicapai masih diadopsi hingga saat ini oleh petani di lokasi kegiatan untuk pengembangan ternak sapi mereka dalam penyediaan pakan ternaknya yaitu melalui tumpangsari tanaman pakan dengan tanaman pangan di lahan sawah dan lahan kering.
- Teknologi yang di gunakan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan ketersediaan pakan yaitu :

1. Pada lahan kering dengan curah hujan sedang/terbatas dilakukan pergiliran tanaman palawija atau tumpangsari kacang-kacangan dengan ubi kayu pada Lorong dengan pembatas tanaman gamal, lamtoro, kelor dan turi.
2. Pada lahan sawah dengan sumber air terbatas dilakukan dengan pola tanam palawija-padi-palawija dengan ubi kayu dan turi di pematang sawah. Sedangkan pada lahan sawah dengan air yang cukup dilakukan dengan pola tanam padi-padi-padi dengan rumput (mott dan paspalum) serta turi di pematang sawahnya.

Berdasarkan hasil pengkajian terdahulu, pemberian biomasa pakan dalam bentuk kering matahari berupa campuran daun ubi, jerami jagung, rumput paspalum, rumput mott dan turi selama 60 hari dapat mempertahankan berat badan pada musim kering dengan tingkat konsumsi pakan kering matahari mencapai 3% dari berat badan.

- Pada wilayah lahan kering, kegiatan ini dirasakan bermanfaat khususnya pada penyediaan pakan kering untuk memperpanjang waktu ketersediaan pakan berkualitas, sehingga mampu sepanjang tahun. Dan

berdasarkan hasil kajian terdahulu, bahwa pemberian pakan kering pada sapi terbukti tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ternak.



Kegiatan penanaman pakan di lahan kering Kabupaten Sumbawa Barat



Kegiatan penanaman pakan di lahan Basah Kabupaten Lombok Barat

2) Teknologi Budidaya hemat air pada padi

- Kegiatan ini berlokasi di salah satu DAS Jangkok di Jurang Sate Hulu bagian hilir yaitu di Kabupaten Lombok Tengah.
- Penentuan ketersediaan air yang merupakan salah satu kom
- Adapun paket teknologinya adalah :
 - ✓ Benih kedelai bermutu sebanyak 20 kg/ha
 - ✓ TOT (Tanpa Olah Tanah) dan OTM (Olah Tanah Minimum)
 - ✓ Penanaman dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 menggunakan jarak tanam (25x25) cm antar rumpun dalam baris; 12,5 cm jarak dalam baris; dan 50 cm sebagai jarak antar barisan/lorong
 - ✓ Pemberian Biourin/pupuk organik cair
 - ✓ Pemupukan menggunakan rekomendasi PUTS
 - ✓ Pengendalian OPT terpadu dilakukan sesuai kebutuhan tanaman
 - ✓ Sistem Pengairan basah kering sesuai kebutuhan

- ✓ Panen tepat waktu (kematangan mencapai 90%) dan segera dikeringkan
- Pertumbuhan tanaman pada TOT tidak seoptimal pertumbuhan tanaman pada lahan yang diolah minimum maupun sempurna. Namun demikian, berat GKG yang diperoleh lebih baik daripada yang OTM.



Proses penanaman menggunakan sistem tanam Jarwo 2:1 pada lahan OTS

3) Teknologi pengolahan limbah ternak ramah lingkungan

- Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah. Daerah ini sudah ditetapkan sebagai daerah wisata budaya dan pertanian organik.
- Kotoran sapi adalah limbah terbesar yang dihasilkan, karena seekor sapi potong dewasa rata-rata mampu menghasilkan kotoran sebanyak 6% dari bobot badan ternak. Limbah peternakan yang berupa kotoran sapi sebagian besar mengandung bahan organik, oleh karena itu kotoran sapi sejak dulu sudah digunakan untuk pemupukan. Pengaruh intensifikasi pertanian mengakibatkan pemakaian pupuk dari limbah peternakan semakin berkurang. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak limbah peternakan yang tidak dimanfaatkan dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
- Membangun sistem pertanian yang mempunyai keterkaitan dan hubungan imbal balik (interaksi) yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) akan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dalam hal itu, penerapan inovasi pemanfaatan

limbah tanaman sebagai pakan ternak dan pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk tanaman.

PUKUP ORGANIK CAIR BIO-URINE
Omni, Dr. Mah. Nuzul, SPM, N. BPTP NTB 2018

BAHAN YANG DIPERLUKAN:

- Urea 100g
- Air perendungan urine volume 800 liter 3 buah
- Ammonia (sangat beres) 3 gram
- Pondsia 3 gram
- Larutan mikroba komersial (Biomix bioaktif)
- Larutan mikroba ASMA (Acetobacter)

PROSES PEMBUATAN:

- Masukkan 800 liter urine sapi ke bak penampung/hormesti
- Tambahkan Hormesti 3 liter (3 liter ASMA, 1 liter Pondsia, 1 liter Ammonia)
- Aduk sampai rata-rata 2 jam, kemudian simpan di dalam ruang dengan suhu 25°C
- Masukkan 1 liter urine sapi ke dalam bak penampung/hormesti
- Tambahkan Hormesti 3 liter (3 liter ASMA, 1 liter Pondsia, 1 liter Ammonia)
- Aduk sampai rata-rata 2 jam, kemudian simpan di dalam ruang dengan suhu 25°C
- Masukkan 1 liter urine sapi ke dalam bak penampung/hormesti
- Tambahkan Hormesti 3 liter (3 liter ASMA, 1 liter Pondsia, 1 liter Ammonia)
- Aduk sampai rata-rata 2 jam, kemudian simpan di dalam ruang dengan suhu 25°C

Cara aplikasi:
 Campurkan 100-200 ml bio-urine per liter air, sudah merata kemudian semprotkan pada tanaman setiap 3-2 minggu sekali.

MANFAAT BIO-URINE:

- meningkatkan kesuburan tanah;
- memperbaiki struktur dan karakteristik tanah;
- meningkatkan kapasitas simpan air tanah;
- meningkatkan efisiensi nutrisi tanah;
- menyediakan hormon dan vitamin bagi tanah;
- menekan pertumbuhan hama penyakit tanaman;
- meningkatkan efisiensi/efektifitas hara dalam tanah dan
- ramah lingkungan.

Teknologi Pemanfaatan Limbah Ternak Sebagai Pupuk/Kompos. Produk ini selain digunakan dilahan pertanian petani, juga dijual ke beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

4) Teknologi Pengendalian Gastrointestinal Parasit menggunakan Herbal Pada Sapi Bali

- Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur.
- Pemeliharaan ternak sapi bali dari serangan penyakit yang disebabkan oleh parasite tetap dilakukan peternak. Dengan banyaknya kebutuhan keluarga, serta banyaknya potensi tumbuh-tumbuhan sebagai obat herbal disekitar tempat tinggal menjadikan teknologi obat herbal sebagai obat untuk mengendalikan serangan parasite dijadikan sebagai alternative peternak untuk pemeliharaan ternaknya.
- Tanaman yang digunakan sebagai obat herbal yang dapat menurunkan jumlah telur cacing diantaranya adalah menggunakan daun Lamtoro (*Leucaena leucocephala*), Gamal (*Gliricidia sepium*), dan Nanas (*Ananas comosus*).



Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat herbal yang banyak dijumpai disekitar tempat tinggal/kandang

- Berdasarkan hasil pengkajian terdahulu, bahwa obat cacing (anthelmintik) berbahan baku herbal dapat menurunkan daya tetas telur cacing secara invitro ($P < 0,05$) dan menurunkan prevalensi gastrointestinal parasit secara invivo ($P > 0,05$)
- 5) Teknologi budidaya kakao mendukung peningkatan produksi kakao
- Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Lokasi ini merupakan salah satu daerah sentra kakao di NTB.
 - Pada lokasi kegiatan di Desa Rempe, umur tanaman kakao pada tahun 2013 rata-rata 26-29 tahun (penanaman kakao dilakukan tahun 1984-1987). Mendukung peningkatan produksi, kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan teknologi budidaya kakao yang salah satunya adalah perbaikan tanaman dengan varietas yang produksi tinggi melalui teknik sambung samping.
 - Teknologi sambung samping yang diterapkan petani meliputi :
 - ✓ Pemangkasan.
Pemangkasan yang diterapkan meliputi :
 1. Pemangkasan produksi pada akhir musim hujan
 2. Pemangkasan pemeliharaan dilakukan setiap bulan
 3. Pemangkasan bentuk dilakukan dua kali setahun.
 - ✓ Pemupukan.
 1. Pemupukan diberikan 2 kali pada awal musim hujan dan akhir musim hujan.
 2. Menggunakan pupuk NPK 300 gr/pohon dan Urea 300 gr/pohon

- ✓ Sambung samping
 1. Entrii diambil dari pohon induk unggul
 2. Menggunakan air kelapa sebagai perangsang tumbuh
 3. Ketinggian sayatan pohon induk tidak melebihi 60 cm dari pangkal batang.
- ✓ Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian PBK menggunakan fungisida dilakukan sebelum dan setelah kakao berbuah.



Kegiatan sambung samping untuk peremajaan tanaman dan peningkatan produksi

Pembersihan lahan yang dilakukan petani secara bertahap pada lahan kakao miliknya

- 6) Teknologi tumpangsari tebu dengan palawija
- Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
 - Teknologi ini masih dilaksanakan oleh beberapa petani dengan maksud agar selama menunggu hasil dari tanaman tebu yang membutuhkan waktu hampir 1 tahun petani tebu mampu memperoleh penghasilan dari tanaman palawija.
 - VUB tebu yang adaptif digunakan adalah PS851 dan PS862. Sedangkan tanaman palawija yang dikembangkan adalah jagung pada MH.
 - Komponen teknologi yang diterapkan antara lain yaitu:
 1. Penggunaan bibit unggul
 2. Pengaturan jarak tanam (juring tunggal) 130 x 50 cm;
 3. Pemupukan (Urea 200 kg + NPK 600 kg + ZA 400 kg per hektar);
 4. Pembubunan I dan II;

5. Penggemburan tanah dan penyiangan;
 6. Pengendalian OPT
- Dari kegiatan tersebut, secara teknis penerapan teknologi mendapat respon sangat baik di tingkat petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangganya.



Penerapan tumpangsari tebu dan palawija membantu petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil jagung dan sebagai pakan bagi ternak sapi yang ada

- 7) Teknologi pakan menggunakan sorgum batang manis untuk induk sapi
 - Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur.
 - Untuk penanaman sorgum yang dilakukan menggunakan jarak tanam 50 x 30 cm pada saat panen menghasilkan biomasa seberat 1 ton/ha. Sehingga jika hijauan pakan segar yang dibutuhkan sebanyak 20 kg untuk satu ekor betina produktif (berat sekitar 200 kg).
 - Dalam 1 ha usahatani sorgum, dalam selang waktu 3 bulan (panen 2 kali), total produksi 1,3 ton/ha dapat memberikan pakan sebanyak 71 kali.
 - Selain memanfaatkan teknologi pakan menggunakan sorgum untuk induk sapi, komoditas sorgum sampai dengan 2018 sudah berkembang pemanfaatan menjadi sorgum untuk olahan pangan yang mendatangkan nilai tambah bagi UMKM dengan bahan baku berasal dari sorgum. Permintaan sorgum tersebut secara langsung juga berdampak pada pendapatan dari usahatani sorgum.

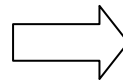


Pertanaman Sorgum dan Produksi sorgum manis yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan olahan

Batang dan limbah tanaman sorgum lainnya yang dijadikan sebagai hijauan pakan ternak

8) Teknologi pakan tambahan spesifik lokasi untuk pedet prasapah pada sapi Bali

- Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara.
- Pemberian pakan tambahan pada pedet dilakukan pada periode menyusui adalah salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mendapatkan pertumbuhan pedet sapi bali yang optimal (sekitar 20% - 22%) selama periode menyusui, dan dilanjutkan setelah disapih.
- Pemberian pakan tambahan pada pedet menyusui mulai umur 60 sampai 180 hari.
- Komponen utama dari formula pakan pedet menyusui untuk mendapatkan pakan dengan kandungan protein dari tanaman turi (*Sesbania grandiflora*).



Pemberian formula pakan tambahan spesifik lokasi untuk pedet prasapah pada sapi Bali

9) Teknologi efisiensi pemupukan jagung.

- Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mendukung peningkatan produktivitas dan produksi jagung serta pencapaian swasembada jagung yang pada akhirnya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga tani.
- Pemberian pupuk yang tepat berpengaruh pada hasil dan efisiensi dari usahatani yang dilakukan. Dengan bantuan petugas lapangan pertanian untuk melakukan uji tanah menggunakan PUTS atau PUTJ guna mengetahui tingkat kesuburan dan kandungan hara tanah, sangat membantu dalam merekomendasikan dosis pemupukan yang efisien untuk petani.
- Komoditas yang dikembangkan adalah jagung hibrida Bima 20 URI yang juga sudah mulai luas pengembangannya di NTB khususnya Pulau Lombok.
- Teknologi yang diterapkan diantaranya :
 1. Persiapan lahan, dilakukan secara TOT dengan menyemprotkan herbisida.
 2. Seed Treatment, bertujuan untuk mencegah penyakit bulai, lalat bibit dan menyeragamkan daya tumbuh.
 3. Penanaman, dilakukan dengan jarak tanam 75 cm x 20 cm dan menggunakan 1 biji per lubang tanam, kemudian lubang ditutupi dengan kompos sebanyak 1 genggam.
 4. Pemupukan, menggunakan 250 kg/ha urea + 250 kg/ha NPK phonska yang diberikan sebanyak 2 kali pada umur 10-14 hst dan umur 30-35 hst dengan cara ditugal 5-10 cm dari batang tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah/kompos.
 5. Penyiangan, dilakukan pada umur 21 hst dengan menggunakan herbisida selektif, dengan dosis 1-2 liter/ha.

6. Pengairan, dilakukan sebanyak 4 sampai 6 kali per musim tanam tergantung kondisi tanah.
7. Pengendalian Hama dan Penyakit. Dilakukan sesuai kondisi dilapangan. Namun untuk menghindari penyakit bulai, di seed treatment menggunakan saromil dengan takaran 2 gr per 1 kg benih.



Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Jagung dengan menerapkan

- 10) Teknologi Budidaya Tebu Sistem Tanam Juring tunggal dan ganda
- Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Dompu yaitu di Kecamatan Pekat.
 - Mendukung kegiatan pengembangan Kawasan pertanian komoditas perkebunan, serta membangun SUP yang terintegrasi dilakukan melalui peningkatan produktivitas tebu, yang salah satunya dengan cara perbaikan komponen teknologi budidaya.
 - Teknologi yang diinformasikan dan masih diaplikasikan oleh petani diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Penerapan sistem tanam juring ganda bibit tunggal PKP 130/70 cm menggunakan pupuk 840 kg NPK phonska + 560 kg ZA + 5 ton kompos per ha.
 - 2) Penerapan sistem tanam juring ganda bibit ganda PK 170/70 cm menggunakan pupuk 1.416 kg NPK phonska + 1.180 kg ZA +5 ton kompos per ha.
 - Penanaman dengan system tanam juring ganda bervariasi penerapannya di tingkat petani. Namun demikian dari teknologi tersebut, diharapkan

mampu meningkatkan populasi tanaman. Dengan potensi provitas juring ganda 120 ton – 130 ton per ha leebih tinggi dibandingkan juring tunggal sebesar 90 ton pe ha.



Penanaman bibit tebu dengan menerapkan sistem tanam juring di Kecamatan Pekat, Dompu

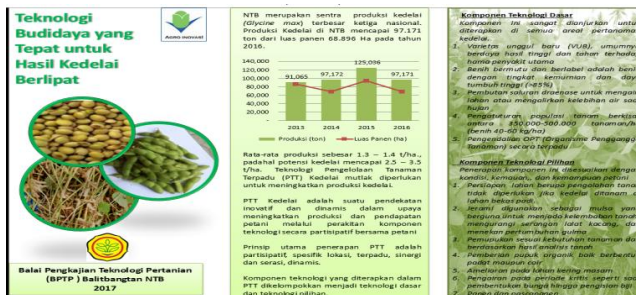


Pertanaman tebu milik petani yang menerapkan system tanam juring ganda bibit

11) Teknologi Budidaya hemat air pada kedelai

- Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada salah satu DAS Jangkok di Jurang sate hulu bagian hilir.
- Adapun paket teknologinya adalah :
 - ✓ Benih bermutu varietas Anjasmoro
 - ✓ TOT (Tanpa Olah Tanah)
 - ✓ Benih ditugal (2/3 biji/lubang), Penutupan lubang tugal dengan pupuk kompos
 - ✓ Pengairan 3 kali selama pertumbuhan :1) saat vase vegetative (25 hst); 2) saat pembungaan (40 hst); 3) saat pengisian polong (60hst)
 - ✓ Pemupukan menggunakan rekomendasi PUTS
 - ✓ Pengendalian OPT sesuai prinsip PHT
 - ✓ Panen ketika sudah matang fisiologis
- Lokasi kegiatan yaitu pada hamparan lahan yang sebelumnya ditanami padi dengan pola padi-padi-kedelai. Manajemen PTT yang tepat dilaksanakan di lahan sawah setelah padi khususnya komoditas kedelai

agar secepatnya dilaksanakan setelah panen padi, serta pemberian pupuk organik cair ramag lingkungan (biourin).



Media Informasi salah satunya berupa leaflet yang digunakan sebagai panduan di lapangan

12) Teknologi budidaya bawang merah

- Kegiatan pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan wera Kabupaten Bima. Kabupaten Bima merupakan sentra pengembangan komoditas Bawang merah di NTB.
- Kegiatan budidaya bawang merah telah lama dilakukan oleh petani di Kabupaten Bima sebagai komoditas utamanya. Namun kegiatan penanaman bawang merah yang dilakukan belum mengacu pada rekomendasi teknologi, sehingga dengan adanya teknologi dirasakan dapat memperbaiki system budidaya bawang petani untuk hasil yang lebih baik.
- Varietas yang dikembangkan pada mulanya hanya menggunakan varietas lokal (keta monca) saat ini telah banyak pula yang menggunakan varietas unggul lainnya yang memiliki produksi tinggi dan pasar yang luas seperti bima brebes, pancasona, super Philip.
- Adapun teknologi budidaya bawang merah yang dilakukan meliputi :
 1. Pengolahan tanah. Kegiatan ini dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna. Kemudian dilakukan pembuatan bedengan dengan lebar 1 m dan panjang sesuai kebutuhan dan tinggi 15-20 cm.
 2. Menggunakan varietas unggul
 3. Tanam. Sebelum di tanam 1/3 bagian atas bibit dipotong untuk menyeragamkan dan mempercepat pertumbuhan umbi samping.

Kemudian bibit yang siap tanam di tanam dengan jarak 15 cm x 15 cm pada bedengan.

4. Pemupukan. Dilakukan dengan memberikan pupuk NPK Phonska sebanyak 750 kg/ha yang diberikan sebanyak 3 kali yaitu saat tanam sebanyak 25%, umur 15 hst sebanyak 50%, dan umur 30 hst sebanyak 25%.
 5. Penyiraman/pengairan. Kegiatan penyiraman tanaman dilakukan setiap hari setelah tanam sampai umur 4 mst (apabila tidak ada hujan), kemudian secara berselang-seling. Kegiatan pengairan dilakukan pada umur 35 hst yang dilakukan dengan cara di leb setiap minggu (d disesuaikan dengan kondisi tanaman di lapangan) hingga umur 55 hst.
 6. Penyiangan. Kegiatan ini dilakukan pada umur 2, 4, 6 mst atau disesuaikan dengan kondisi gulma di pertanaman
 7. Pengendalian hama dan penyakit berdasarkan konsep PHT.
 8. Panen. Dilaksanakan setelah 80% populasi batang bawang lemas atau kira-kira umur 55-60 hst dengan cara dicabut.
- Dari hasil yang telah dilakukan, penyakit yang masih dominan menyerang tanaman bawang merah disekitar lokasi kegiatan adalah penyakit mati pucuk dan busuk umbi. Oleh karenanya petani masih mengandalkan penyemprotan obat-obatan yang tinggi untuk mencegah kehilangan hasil yang dikarenakan serangan hama/penyakit tersebut.



Pertanaman bawang merah pada lahan kering di Kec. Wera Kab. Bima

13) Teknologi Perbenihan tebu dengan metode budchip.

- Paket perbenihan tebu tahun 2017 dengan metode budchip diterapkan petani kooperator untuk memperbanyak bibit tebu swadaya petani ditahun 2018 untuk kebutuhan sendiri
- Paket teknologinya sebagai berikut :
 1. Penerapan sistem tanam juring ganda bibit tunggal PKP 130/70 cm menggunakan pupuk 840 kg NPK phonska + 560 kg ZA + 5 ton kompos per ha.
 2. Penerapan sistem tanam juring ganda bibit ganda PK 170/70 cm menggunakan pupuk 1.416 kg NPK phonska + 1.180 kg ZA + 5 ton kompos per ha.
- Teknologi ini dihasilkan dari Kajian sistem usaha pertanian integrasi tebu dan ternak sapi mendukung kawasan perkebunan tebu di Kabupaten Dompu. Kegiatan ini dilakukan pada agroekosistem lahan kering dataran rendah berbasis tanaman perkebunan (tebu) di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Pelaksanaan kegiatan pada luasan 5 ha (rawat ratoon) dan terintegrasi dengan demplot untuk kelompok peternak penggemukan sapi.
- Selain 1 paket teknologi tersebut, juga menghasilkan 2 model integrasi yaitu 1). Model integrasi tebu sistem tanam juring tunggal dengan ternak sapi pembiakan pada kandang individu; 2). Model integrasi tebu sistem tanam juring ganda bibit tunggal dengan ternak sapi pembiakan pada kandang individu.



Bibit tebu dan sistem pertanamannya saat panen



Integrasi Tebu dan Ternak Sapi

Indikator kinerja ke-dua yaitu “ Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan” dicapai melalui tiga kegiatan Balai. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pengkajian inhouse yang dilaksanakan dalam DIPA BPTP NTB tahun 2018. Adapun output yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut adalah :

- 1) Teknologi Budidaya Bawang Putih Hemat Input di dataran tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Teknologi ini dihasilkan dari kegiatan Kajian Paket Teknologi Budidaya Bawang Putih Hemat Input di Nusa Tenggara Bara. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada agroekosistem lahan tadah hujan dataran tinggi sembalun di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timurseluas.
 - Paket teknologi budidaya bawang putih hemat input di dataran tinggi yang dihasilkan meliputi :
 - a. *Penyiapan Lahan.*** Lahan dibersihkan dari sampah, gulma dan tanaman lain yang merupakan inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Bawang Putih. Bila diperlukan, lahan terlebih dahulu disemprot dengan herbisida. Kemudian tanah di baja/di cangkul sedalam 20-30 cm. Kemudian lahan dibiarkan terbuka selama 1 minggu.

b. Penambahan Bahan Organik dan Pembuatan Bedengan.

Bahan organik (pupuk kandang) yang sudah terdekomposisi diberikan dengan dosis sesuai perlakuan. Bila pH tanah <4,5 lahan ditambahkan kapur pertanian/dolomit dengan dosis 1,5 ton/ha. Kemudian pembuatan bedengan lebar 100 cm, jarak antar bedengan 30 cm, tinggi bedengan 30-40 cm, dengan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. Bedengan yang telah dibuat ditutup dengan mulsa plastik hitam perak yang telah dibuatkan lubang tanam. Penggunaan mulsa dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan tanaman akibat percikan air hujan pada bulan Februari – Maret 2018 pada saat tanaman sedang dalam fase vegetative dan mengurangi tumbuhnya gulma serta mempertahankan kelembaban tanah pada bulan April – Mei ketika hujan sudah mulai berkurang.

c. Penyiapan benih. Varietas yang digunakan dalam Pengkajian ini adalah Sangga Sembalun dan dipilih dengan ukuran umbi besar (bobot umbi 25 – 60 gram kering), dan berlabel. Warna siung agak merah keunguan yang merupakan ciri utama varietas Sangga Sembalun. Umur simpan umbi 4 – 5 bulan (sudah ada titik tumbuhnya yang dibuktikan dengan cara membelah suing dan melihat titik tumbuh yang muncul). Kemudian dilakukan pemisahan umbi berdasarkan ukuran jika suing sangat bervariasi. Benih disimpan di tempat yang kering, terlindung dan diberi alas.

d. Penanaman Benih. Benih ditanam pada lubang tanam dengan jarak 10 x 15 cm kemudian ditutup dengan pupuk organik. Bedengan disiram dengan air hingga cukup basah. Penyulaman dilakukan bila ada umbi yang tidak tumbuh pada umur maksimal 2 minggu sejak tanam.

e. Pemupukan. Pupuk dasar berupa pupuk kandang, pupuk NPK dan SP-36, diberikan sebelum pemasangan mulsa plastik dengan cara ditaburkan lalu dicampur dengan tanah bedengan, sedangkan

pupuk susulan akan diberikan dengan cara pengocoran atau cara lain supaya lebih efektif dimanfaatkan oleh tanaman. Juka masih banyak hujan, diberikan dengan cara ditabur pada perakaran tanaman.

- f. Pengairan.** Air dibutuhkan mulai dari penanaman sampai dengan menjelang panen. Untuk pertumbuhan awal (setelah tunas tumbuh merata), penyiraman dilakukan setiap hari sampai tanaman berumur 30 hari (kecuali pada musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman). Selanjutnya penyiraman dilakukan 2 hari sekali sampai 5 hari menjelang panen.
- g. Pemeliharaan.** Gulma sekitar tanaman disiangi sejak pertumbuhan hingga menjelang pembentukan umbi. Tanaman yang terserang penyakit/hama dicabut dan untuk menghindari penularan dimasukkan ke karung dan dibuang di luar kebun. Untuk menjaga agar proses pembentukan umbi tidak terganggu hentikan pencabutan gulma.
- h. Rouging.** Kegiatan rouging dilakukan bersama tim BPSB-P sebagai bagian dari proses sertifikasi benih untuk memastikan bahwa tanaman yang ditanam homogen dan tidak tercampur dengan varietas lain.
- i. Pengendalian OPT.** Pencegahan serangan hama tanaman dilakukan dengan menanam 3-5 baris tanaman jagung di pinggir lahan sebagai border. Border jagung ditanam kurang lebih sebulan sebelum penanaman bawang putih. Selain itu juga dipasang perangkap kuning untuk mengurangi populasi hama kutu-kutuan. Penyemprotan fungisida sistemik dilakukan sekali seminggu selama 3 pekan pertama sebagai pertahanan tanaman dari serangan patogen pada fase vegetative awal. Pada pekan ke 4 dan seterusnya dilakukan penyemprotan dengan fungisida kontak (tergantung patogen yang menyerang) sesuai perlakuan. Pengendalian hama tanaman dilakukan dengan pergiliran insektisida

sesuai hama yang menyerang dan dilakukan pergiliran jenis insektisida secara bijaksana sesuai perlakuan. Air yang dipakai untuk penyemprotan diturunkan pH-nya mengikuti pH pestisida. Penurunan pH air dilakukan dengan pemberian cairan asam nitrat (satu sendok makan cairan asam nitrat 20% untuk 15 liter air). Penyemprotan dilakukan pada sore hari (antara pukul 16.00 sampai pukul 18.00) atau kalau pada musim hujan disesuaikan waktunya, agar pestisida yang sudah disemprotkan tidak langsung tercuci oleh air hujan.

j. Panen dan Pasca Panen. Panen bawang putih dilakukan umur 95-110 hst (tergantung varietasnya). Untuk varietas Sangga Sembalun dapat dipanen pada umur 95 hari setelah tanah.

k. Penyimpanan. Bawang putih yang dipanen kemudian disimpan di dalam gudang untuk persediaan benih pada musim tanam berikutnya. Gudang penyimpanan dilengkapi ventilasi memadai agar sirkulasi udara lancar dan kelembaban sekitar 65 – 70% dan suhu optimum 30°C, sehingga diperoleh berat bersih (setelah dikurangi susut 60%) untuk benih. Namun bila tidak ada gudang penyimpanan, maka akan disimpan dengan metode konvensional yang berlaku di petani dengan tetap melakukan pengamatan susut bobot pada beberapa umur simpan benih tersebut. Pemasangan label dilakukan pada benih yang sudah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim BPSB-P Provinsi NTB.

- Permasalahan yang dihadapi adalah terjadi kekeringan (tidak ada hujan sejak awal April 2018 di lokasi pengkajian, sehingga diberikan pengiran suplementer akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pertanaman sehingga hasil panen kurang maksimal.



Pelabelan dan proses persiapan distribusi benih bawang putih untuk dikembangkan lanjut di NTB

2) Teknologi Budidaya Tebu Sistem Juring.

- Kegiatan ini dilakukan pada agroekosistem lahan kering dataran rendah berbasis tanaman perkebunan (tebu) di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.
- Teknologi yang dihasilkan dari Kajian sistem usaha pertanian integrasi tebu dan ternak sapi ini adalah Budidaya Tebu Sistem Juring mendukung kawasan perkebunan tebu di Kabupaten Dompu.
- Paket Teknologi yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu :
 - ✓ Penerapan sistem tanam juring ganda bibit ganda (PK 170/70)
 - ✓ Paket pemupukan A (500 kg NPK + 100 kg Urea per hektar).
- Teknologi ini menghasilkan provitas tebu lebih baik dari paket pupuk yang lain. Sistem tanam juring ganda bibit ganda (PK 170/70) menghasilkan provitas tebu lebih baik dari juring yang lain, gabungan kedua teknologi (paket pupuk dan juring ganda) tersebut memperoleh provitas 151,25 ton/ha.
- Paket pakan yang disukai adalah rumput alam dan jenis hijauan lain termasuk limbah tebu (eksisting).
- Pelaksanaan kegiatan pada luasan 5 ha (rawat ratoon) dan terintegrasi dengan demplot untuk kelompok peternak penggemukan sapi.



Pertanaman tebu di lokasi kegiatan.

3) Paket Teknologi Usahatani Padi Sawah Berbasis Organik Mendukung Good Agricultural Practice (GAP) di NTB

- Teknologi ini dihasilkan dari kegiatan Kajian Paket Teknologi Berbasis Organik Mendukung Good Agricultural Practice (GAP). Kegiatan ini dilakukan pada agroekosistem lahan sawah dataran rendah berbasis tanaman pangan di Kelompok Tani Cipta Karya II Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
- Pendekatan yang digunakan adalah onfarm research pada MK.I 2018 seluas 5 ha terintegrasi dengan kelompok peternak penggemukan sapi pada kegiatan bioindustri, di bawah bimbingan dan pengawasan peneliti dan penyuluh.
- Enam paket teknologi yang dikaji sebagai perlakuan masing-masing dengan tiga ulangan yang dirancang secara acak kelompok, yaitu Paket A (100% pupuk organik tanpa pupuk an organik); Paket B (75% pupuk organik dan 25% dosis pupuk an organik); Paket C (50% pupuk organik dan 50% dosis pupuk an organik); Paket D (25% pupuk organik dan 75% dosis pupuk an organik); Paket E Rekomendasi PUTS (50% pupuk organik dan 100% dosis pupuk an organik); dan Paket F (100% dosis pupuk an organik tanpa pupuk organik sebagai kontrol). Dosis pupuk kompos 4 t/ha, NPK Phonska 250 kg/ha, Urea 100 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan ZA 100 kg/ha.
- Hasil kajian menunjukkan bahwa produktivitas paket A rata-rata mencapai 5,76 t/ha gabah kering panen dengan kadar air rata-rata

23,57%. Paket E memberikan produktivitas tertinggi (6,98 t/ha), disusul paket D (6,81 t/ha), paket C (6,28 t/ha), B (6,25 t/ha) dan cara petani (6,24 t/ha). Seluruh paket yang dikaji memberikan keuntungan yang layak dengan nilai $R/C > 1$, keuntungan tertinggi adalah paket D dengan R/C 2,54 disusul paket E dan C dengan R/C 2,41 dan 2,40, paket B, F dan A masing-masing dengan R/C 2,36; 2,35 dan 2,29. Semua paket teknologi yang dikaji memberikan nilai efisiensi teknis yang baik yaitu antara 2,92-2,54, demikian pulan efisiensi ekonomis cukup tinggi, yaitu antara 3,26 – 27,44%. Berdasarkan hasil tersebut maka paket teknologi yang direkomendasikan adalah Paket C dan D, yaitu penggunaan pupuk organik 1-2 t/ha dan mengurangi penggunaan pupuk an organik sebanyak 25%.

- Paket teknologi padi berbasis organik mendukung Good Agricultural Practice (GAP) di NTB yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
 - 1. Benih dan sumber benih.** Benih yang digunakan adalah varietas unggul Balitbangtan varietas Inpari-32 sebanyak 20 kg/ha, sumber benih dari UPBS BPTP NTB dengan kelas benih pokok/Stock Seed (SS) Label Ungu.
 - 2. Persemaian.** Lahan persemaian seluas 250 m², pengolahan tanah sempurna, dibajak dengan traktor kemudian dihancurkan/diratakan hingga memperoleh pelumpuran yang sempurna. Buat bedengan dengan ukuran lebar 100 cm dan panjang disesuaikan dengan panjang lahan, diantara bedengan dibuat drainase sedalam 20-30 cm. Untuk memudahkan pencabutan benih maka diatas bedengan ditaburi pupuk kompos dicampur sekam atau abu sekam setebal sebanyak 2-4 kg/m². Pemupukan pada persemaian menggunakan pupuk Urea dengan dosis 20-40 gr/m² diberikan setelah umur 7 HST. Sebelum disemai, benih di rendaman dalam air bersih selama 24 jam sambil membuang benih yang mengambang/mengapung, sehingga hanya benih yang tenggelam yang dipakai. Setelah 24 jam perendaman kemudian ditiris dan dimasukkan dalam karung gabah

dan dibiarkan di tempat teduh selama 24 jam. Setelah benih berkecambah, kemudian siap ditebar. Setelah benih ditebar, maka taburi kembali dengan kompos yang dicampur abu sekam di atasnya.

- 3. Pengolahan lahan.** Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna, yaitu 2 kali bajak dan 1 kali garu. Bersamaan dengan pengolahan lahan diberikan pupuk organik berupa pupuk kompos dari kotoran sapi yang sudah dipermentasi sebanyak 2 t/ha.
- 4. Penanaman.** Penanaman dengan sistem tanam jarak legowo 2:1 menggunakan jarak tanam (25x25) cm antar rumpun dalam baris; 12,5 cm jarak dalam baris; dan 50 cm sebagai jarak antar barisan/lorong atau (25x12,5x50) cm dengan jumlah populasi tanaman sebanyak 213.300 rumpun/ha, atau meningkatkan populasi 33,31% dibanding pola tanam tegel (25x25) cm yang hanya 160.000 rumpun/ha. Penyiapan garis tanam menggunakan caplak dengan jarak gigi caplak adalah 25 cm. Benih ditanam pada umur 18-20 hari setelah tebar dengan jumlah 2-3 batang/rumpun.
- 5. Pemeliharaan.** Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyiangan, pengendalian organisme pengganggu tanaman dan pengairan. Dosis pupuk organik adalah 2 t/ha diberikan bersamaan pada saat olah tanah. Sedangkan pupuk an organik mengacu pada rekomendasi Pemupukan Untuk Tanah Sawah (PUTS) dengan dosis NPK Phonska 250 kg/ha, Urea 100 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan ZA 100 kg/ha. Pemberian pupuk an organik diberikan 3 tahap. Pemupukan tahap awal diberikan pada umur 7 hari setelah tanam (HST) dengan dosis 1/3 dosis (NPK, Urea dan ZA) dan seluruh dosis SP-36. Pemupukan susulan pertama diberikan setelah penyiangan pertama yaitu pada umur 30 HST dengan dosis 1/3 dosis (NPK, Urea dan ZA), dan pemupukan susulan kedua diberikan pada umur menjelang berbunga (umur 45 HST) dengan dosis 1/3 dosis (NPK, Urea dan ZA).

Penyiangan dilakukan pada umur 30 HST atau sebelum pemberian pupuk susulan pertama dan dilakukan secara manual atau menggunakan herbisida selektif. Pengendalian OPT dilakukan secara terpadu, aplikasi obat-obatan dilakukan hingga sebelum keluar malai, dengan cara penyemprotan menggunakan hand sprayer. Jenis obat-obatan yang umum digunakan adalah fungisida dan insektisida yang bersifat preentif atau pencegahan baik terhadap serangan hama maupun penyakit yang disebabkan virus atau cendawan. Pengaturan pengairan mengikuti pola pengaturan air irigasi setempat

- 6. Panen.** Panen dilakukan saat persentase kematangan mencapai 90% dengan cara disabit menggunakan sabit bergerigi oleh tenaga panen. Setelah disabit segera melakukan perontokan menggunakan alat perontok sederhana yang dibangkitkan tenaga mesin. Tempat perontokan diberi alas dari terpal untuk mengurangi kehilangan gabah karena tercecer.



Aplikasi pupuk kompos pada saat pengolahan tanah (18/3/18), dan Penanaman dengan jajar legowo 2:1 (27/3/18)

Penampilan agronomis tanaman



Pengukuran petak ubinan dan panen pada umur 95 HST (29/6/18), serta Pengukuran kadar air gabah pada saat panen (29/6/18)

Kegiatan pengkajian inhouse yang dilaksanakan oleh BPTP NTB dalam Tahun Anggaran 2018 total kegiatan seluruhnya sebanyak 4 kegiatan. Selain 3 judul kegiatan diatas, judul ke empat yaitu "Kajian Kelayakan Sosial Ekonomi Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi di Nusa Tenggara Barat". Dalam pelaksanaan kegiatannya, kegiatan ini harus putus/dihentikan di tengah tahun dikarenakan ada refokusing anggaran tahun 2018 sebanyak Rp 5 Milyar. Dari semua kegiatan yang ada, kegiatan Kajian Sosesk adalah salah satunya yang sisa anggarannya harus terkena refisi refokushing tersebut sebesar 96% dari pagu kegiatan. Dengan demikian, rasio pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2018 diperhitungkan hanya berasal dari 3 kegiatan pengkajian.

Indikator kinerja ke-tiga dari sasaran pertama yang ditargetkan dalam tahun 2018 diukur dengan satu indikator yaitu "Jumlah rekomendasi kebijakan". Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator tersebut telah dicapai melalui 1 kegiatan yaitu Analisis Kebijakan Pertanian.

Output yang dihasilkan berupa 2 rekomendasi kebijakan yaitu : 1) Opsi kebijakan/ strategi optimalisasi kinerja sistem distribusi pupuk di provinsi NTB; dan 2) Pengaruh kualitas beras/gabah terhadap harga beras/gabah mendukung kebijakan serap gabah/beras di NTB.

Adapun opsi kebijakan/strategi optimalisasi kinerja sistem distribusi pupuk di provinsi NTB, meliputi :

- Perlu dioptimalkan peran komisi pengawas pupuk dan pestisida (KP3) yang mengawasi distribusi pupuk di kelompok tani.
- Membangun database petani yang baik melalui aplikasi E-tani/kartu tani tahun 2018. Database petani bisa lebih baik, sehingga bantuan benar-benar terdistribusi merata dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SK.

- Regulasi bongkar muat barang khususnya pupuk di pelabuhan harus jelas sehingga membawa kepastian hukum bagi stakeholder serta dapat mempersingkat waktu dwelling time.
- Distributor yang sudah mengambil pupuk di BUMN PSO (pupuk kaltim dan petrokimia) harus segera mengeluarkannya dari gudang dan menyimpan di gudang sendiri milik distributor. Penentuan distributor pupuk bersubsidi semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi bukan politik.
- Updating data penambahan dan pengurangan luas baku lahan pertanian dilakukan secara periodic.
- Penegakan hukum terhadap penyelewengan distribusi pupuk, serta Regulasi yang dikeluarkan pemda sebaiknya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yang berpotensi menghambat distribusi pupuk.
- Perlu menghitung dengan cermat kebutuhan pupuk di bulan Desember, karena distribusi pupuk bersubsidi tidak boleh menyeberang tahun.
- Perlu mengadakan study banding antara distributor antar pulau (di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) agar bisa mendapatkan pola distribusi yang terbaik.
- Mengurangi GAP Perencanaan dan Anggaran dengan memfokuskan kegiatan untuk mencapai visi dan misi kementerian Pertanian.

Kebijakan mengenai Pengaruh kualitas beras/gabah terhadap harga beras/gabah mendukung kebijakan serap gabah/beras di NTB, meliputi :

- A. Serap gabah/beras memiliki korelasi/hubungan yang erat dengan harga beras, harga GKG, Berat GKG, berat beras, Kadar air beras, persen beras utuh, biaya pengolahan gabah menjadi beras termasuk didalamnya biaya transportasi. Hal ini dibuktikan dengan :
1. Semakin tinggi harga beras maka serapan beras juga tinggi tetapi hal ini bisa berdampak pada terjadi persaingan yang tidak sehat (harga meningkat tidak wajar di pasar).
 2. Semakin tinggi harga GKG semakin tinggi serap gabah GKG oleh bulog.

3. Semakin berat GKG semakin tinggi serap gabah GKG oleh bulog.
 4. Semakin berat beras semakin tinggi serap gabah GKG oleh bulog.
 5. Semakin tinggi Kadar air beras semakin rendah serap beras oleh bulog.
 6. Semakin tinggi persentase beras utuh semakin tinggi serap beras oleh bulog.
 7. Semakin tinggi biaya pengolahan gabah menjadi beras (termasuk biaya transportasi) semakin rendah serap beras oleh bulog melalui mitra bulog.
- B. Harga/nilai gabah GKG memiliki korelasi/hubungan erat dengan rendemen GKG ke beras, semakin tinggi rendemen GKG ke beras semakin tinggi harga/nilai gabah GKG.
- C. Harga/nilai beras memiliki korelasi/hubungan erat dengan berat beras, semakin berat beras semakin tinggi harga/nilai beras.



Kegiatan koordinasi dan pertemuan dengan instansi terkait dan stakeholder, membahas tentang kebijakan distribusi pupuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas layanan public di BPTP NTB

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB (Nilai IKM)	3	3	100

Indikator kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan public Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB" ditargetkan output berupa tiga nilai IKM.

Dari target indikator kinerja terhadap layanan publik, output yang mampu dicapai adalah 3 nilai IKM. Ke tiga nilai tersebut berasal dari 5 layanan publik yang ada di BPTP NTB. Adapun 5 layanan Balai tersebut adalah :

1. Unit pelayanan umum
2. Unit pelayanan perpustakaan
3. Unit pelayanan lab diseminasi
4. Unit pelayanan UPBS
5. Unit laboratorium tanah

Masing-masing unit terdiri dari jumlah sampel yang yang berbeda-beda dari hasil survey, yang secara rinci disajikan dalam tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah sampel permasing-masing Unit pada Pelayanan di BPTP Balitbangtan NTB

NO.	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH SAMPEL	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	UPBS	26	16	10
2.	Perpustakaan	24	11	13
3.	Laboratorium Tanah	33	23	10
4.	Laboratorium Diseminasi	23	10	13
5.	Umum	30	14	16

Berdasarkan hasil analisis IKM yang sudah dilaksanakan, secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan di BPTP NTB rata-rata sudah Baik.

PENGOLAHAN DATA IKM
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK
ALAMAT
TELP/FAX

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB/DISEMINASI
Jln Raya Peninjauan Narmada
(0370)671312/671620

RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2	3	3	4	4	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	2	3	3	3	3
5	2	3	4	4	3	3	2	4	2
6	4	4	4	4	3	4	2	4	3
7	2	3	4	4	3	4	3	4	3
8	2	4	4	4	3	3	3	4	2
9	3	3	3	4	3	3	3	3	3
10	4	4	3	4	3	3	3	3	3
11	3	3	3	4	3	3	3	3	3
12	4	4	4	4	3	3	2	3	3
13	4	3	3	4	3	4	4	4	2
14	3	3	3	4	3	3	3	3	3
15	2	4	4	4	2	3	3	3	3
16	3	3	3	4	3	3	3	3	3
17	4	4	4	4	3	3	3	4	3
18	3	3	3	4	3	3	3	3	3
19	3	3	3	4	2	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	4	4	3	3	3	3	3
23	3	3	3	4	3	3	3	3	3
71	76	79	91	67	73	68	76	67	

NRR PER UNSUR= JMLH NILAI PERUNSUBUR/ JUMLAH KUISIONER YANG TERISI

3,09	3,30	3,43	3,96	2,91	3,17	2,96	3,30	2,91
------	------	------	------	------	------	------	------	------

NRR TERTIMBANG PERUNSUBUR= NRRPERUNSUBUR X 0,071

0,34	0,36	0,38	0,44	0,32	0,35	0,33	0,36	0,32
------	------	------	------	------	------	------	------	------

NILAI INDEKS

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	PERSYARATAN	3,09
U2	PROSEDUR	3,30
U3	WAKTU PELAYANAN	3,43
U4	BIAYA/ TARIIF	3,96
U5	PRODUK LAYANAN	2,91
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,17
U7	PRLAKU PELAKSANA	2,96
U8	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKKAN	3,30
U9	SARANA DAN PRASARANA	2,91

KINERJA

Baik	IKM UNIT PELAYANAN MUTU PELAYANAN
	A (SANGAT BAIK) : 88,31-1000
	B (BAIK) : 76,61-88,30
	C (KURANG BAIK) : 65,00-76,60
	D (TIDAK BAIK) : 25,00-64,99

KETERANGAN

U1-U9 = UNSUR UNSUR PELAYANANA

NRR = NILAI RATA-RATA

IKM = INDEKS KEPuasan MASYARAKAT

*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG

*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG/25

NRR PERUNSUBUR=JUMLAH NRR TERTIMBANG/JUMLAH KUISIONER TERISI

NRR TERTIMBANG= NRR PERUNSUBUR X 0,111 PERUNSUBUR

PENGOLAHAN DATA IKM
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK
ALAMAT
TELP/FAX

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NTB/UPBS
Jln Raya Peninjauan Narmada
(0370)671312/671620

RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	4	4	3	4	3	4	4
2	4	4	3	4	3	4	3	3	4
3	4	4	3	4	2	4	3	4	3
4	4	4	4	4	3	4	3	3	3
5	4	4	4	4	3	4	3	4	3
6	4	4	4	4	3	4	3	4	3
7	4	4	3	4	3	4	3	3	3
8	4	4	4	4	3	4	3	4	4
9	4	4	4	4	3	4	3	3	3
10	4	4	4	4	3	4	3	4	3
11	4	4	3	4	3	4	3	3	3
12	4	4	4	4	3	4	3	3	3
13	4	4	4	4	2	4	3	3	3
14	4	4	4	4	3	4	3	4	3
15	4	4	3	4	3	4	3	4	3
16	4	4	3	4	3	4	3	4	3
17	4	4	4	4	3	4	3	3	4
18	4	4	3	4	3	4	3	3	4
20	4	4	3	4	2	4	3	4	4
21	4	4	4	4	3	4	3	4	4
22	4	4	4	4	3	4	3	4	4
23	4	4	4	4	3	4	3	4	3
24	4	4	4	4	2	4	3	3	4
25	4	4	4	4	3	4	3	4	4
26	4	4	4	4	3	4	3	4	4
100	100	92	100	71	100	75	90	86	

NRR PER UNSUR= JMLH NILAI PERUNSUBUR/ JUMLAH KUISIONER YANG TERISI

3,85	3,85	3,54	3,85	2,73	3,85	2,88	3,46	3,31
------	------	------	------	------	------	------	------	------

JUMLAH KUISIONER YANG TERISI

NRR TERTIMBANG PERUNSUBUR= NRRPERUNSUBUR X 0,011

0,42	0,42	0,39	0,42	0,30	0,42	0,32	0,38	0,36
------	------	------	------	------	------	------	------	------

NILAI INDEKS

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	PERSYARATAN	3,85
U2	PROSEDUR	3,85
U3	WAKTU PELAYANAN	3,54
U4	BIAYA/ TARIIF	3,85
U5	PRODUK LAYANAN	2,73
U6	KOMPETENSI PELAKSANA	3,85
U7	PRLAKU PELAKSANA	2,88
U8	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKKAN	3,46
U9	SARANA DAN PRASARANA	3,31

KINERJA

Sangat Baik	IKM UNIT PELAYANAN MUTU PELAYANAN
	A (SANGAT BAIK) : 88,31-1000
	B (BAIK) : 76,61-88,30
	C (KURANG BAIK) : 65,00-76,60
	D (TIDAK BAIK) : 25,00-64,99

KETERANGAN

U1-U9 = UNSUR UNSUR PELAYANANA

NRR = NILAI RATA-RATA

IKM = INDEKS KEPuasan MASYARAKAT

*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG

*) = JUMLAH NRR TERTIMBANG/25

NRR PERUNSUBUR=JUMLAH NRR TERTIMBANG/JUMLAH KUISIONER TERISI

NRR TERTIMBANG= NRR PERUNSUBUR X 0,111 PERUNSUBUR

Pengolahan data IKM terhadap penilaian layanan dari beberapa layanan public yang ada di BPTP NTB

UPBS

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN BP2TP**

Tanggal Survei : 5 Juli 2018

Jenis Kelamin : L P
 Pendidikan : SD SMP SMA ST S2 S3
 Pekerjaan : PNS TNI POLRI KWARTIR NIKRAUSAMA
 LAINNYA :

Unit : 37

Jenis layanan yang diterima : (Misal : Perpustakaan, Kunjungan Tagrimat, layanan lainnya)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P1		P1
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya dalam pelayanan.	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4		

Perpustakaan

**YARAKAT (SKM)
BP2TP**

Tanggal Survei : 5 Juli 2018

Jenis Kelamin : L P
 Pendidikan : SD SMP SMA ST S2 S3
 Pekerjaan : PNS TNI POLRI KWARTIR NIKRAUSAMA
 LAINNYA :

Unit : 37

Jenis layanan yang diterima : (Misal : Perpustakaan, Kunjungan Tagrimat, layanan lainnya)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P1		P1
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya dalam pelayanan.	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4		

Kuisisioner penilaian layanan, contoh pada layanan UPBS dan Pustaka

IV. PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan pencapaian kerjanya menunjukkan bahwa kinerja BPTP NTB Tahun 2018 telah tercapai walaupun masih terdapat capaian kegiatan yang belum memenuhi target yang direncanakan. Sejalan dengan hal tersebut, BPTP NTB diharapkan terus melakukan kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah propinsi/kabupaten dalam setiap kegiatannya. Tingkat kepercayaan terhadap inovasi teknologi Badan Litbang Pertanian yang disampaikan oleh BPTP perlu ditingkatkan, baik sebagai nara sumber, maupun dalam pendampingan langsung teknologi pertanian pada pengguna.

Realisasi keuangan satker BPTP NTB sampai dengan akhir TA. 2018 mencapai Rp. 57.164.153.256 (62,23%) dari total anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA. 2018 yaitu sebesar Rp 91.864.403.000. Dari masing-masing jumlah belanja, realisasi anggaran belanja yang paling besar serapannya adalah belanja non operasional sebesar Rp. 43.599.141.438 (56,82%) dari anggaran sebesar Rp. 76.735.121.000,- kemudian anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 7.389.286.286 (96,53%) dari anggaran sebesar Rp. 7.654.628.000, realisasi belanja modal Rp. 4.799.072.048 (78,84%) dari anggaran tersedia Rp 6.087.454.000 dan realisasi anggaran belanja operasional sebesar Rp. 1.376.653.484 (99,24%) terhadap anggaran tersedia Rp. 1.387.200.000.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan laporan SAKIP untuk mendukung dan memperbaiki kinerja balai pada masa yang akan datang, antara lain:

- 1) Pengkajian BPTP NTB banyak ditujukan untuk mengatasi masalah pada agroekosistem lahan kering. Oleh karenanya perlu perencanaan kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengkajian dan diseminasi terutama pada penetapan target capaian dan pelaksanaan kegiatan yang banyak dilakukan pada musim hujan.
- 2) Kegiatan pengkajian dan diseminasi BPTP NTB keluarannya tidak hanya pada capaian *output*, namun lebih difokuskan pada capaian *outcome* dan *impact*.

Dengan demikian, perlu dibuatkan suatu kegiatan yang dapat memwadahi dan menjawab kebutuhan SAKIP terutama untuk indikator manfaat dan dampak teknologi yang dihasilkan.

- 3) Hasil monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya dapat ditindaklanjuti oleh Balai dan dijadikan acuan untuk perencanaan kegiatan lanjutan di tahun berikutnya.
- 4) Untuk mendukung capaian kegiatan Balai, perlu terus dilakukan pembinaan secara sistematis terhadap SDM peneliti dan penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalui jalur formal maupun informal.
- 5) Pedoman penyusunan SAKIP perlu disosialisasikan pada peneliti dan penyuluh, agar dalam pengisian dan penentuan indikator kinerja benar-benar akurat dan dapat terukur.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Pencapaiannya BPTP NTB 2015-2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target				
			2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2019 (8)
1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis	Teknologi	4	4	3	3	3
	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya	Teknologi	0	1	0	0	0
2. Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	Model	2	2	2	2	2
3. Terdiseminaskannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna	Teknologi	4	5	3	3	3
	Jumlah teknologi komoditas lainnya yang terdiseminasi ke pengguna	Teknologi/ Informasi	1	1	0	0	0
4. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan	Jumlah Produksi Benih Sumber	Ton	207.29	74	64.45	15	41
5. Tersedianya Taman Teknologi Pertanian	Jumlah Kabupaten lokasi TTP	Kabupaten	0	1	1	1	1
6. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah	Rekomendasi	1	1	1	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7. Dihasilkannya layanan operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi	Jumlah layanan internal dan layanan perkantoran	Layanan	6	6	6	6	6
8. Dihasilkannya Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Mendukung Swasembada Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih	Jumlah SL Terintegrasi Desa Mandiri Benih	Provinsi	0	1	1	1	1
9. Tersedianya sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Jumlah akses sumberdaya genetik yang terkonservasi dan terdokumentasi	Akses	0	0	5	5	5

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) NTB

Alamat: Jalan Raya Peninjauan Narmada - 83371; Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620
Website: <http://www.ntb.litbang.pertanian.go.id>; E-mail: bptp-ntb@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Saleh Mokhtar

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Syakir

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Narmada, 5 Juli 2018

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Muhammad Syakir

M. Saleh Mokhtar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi	1. Jumlah paket teknologi spesifik lokasi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	13 Paket teknologi
		2. Rasio paket teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan terhadap jumlah pengkajian teknologi spesifik lokasi yang dilakukan pada tahun berjalan	100 %
		3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	1 Rekomendasi kebijakan
2	Meningkatnya kualitas layanan publik di BPTP NTB	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP NTB)	3 Nilai IKM

KEGIATAN

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian

ANGGARAN

Rp. 91.515.557.000

Narmada, 5 Juli 2018

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat



Muhammad Syakir



M. Saleh Mokhtar

Lampiran 3. Rincian Revisi DIPA TA 2018

No	Tanggal	Uraian	Pagu Sebelum (Rp 000)	Pagu Menjadi (Rp 000)
1.	13 Feb 2018	Revisi Administrasi, kesalahan lokasi KPPN	25.990.619	25.990.619
2.	02 Mei 2018	Penambahan pagu untuk pengadaan roda 4 senilai Rp 339.889.000,- serta Pembangunan dan renovasi kandang ayam KUB senilai Rp 200.000.000,-	25.990.619	26.530.508
3.	04 Juli 2018	Refokussing anggaran senilai Rp 5.320.311.000,- dan penambahan Pagu Program #Bekerja senilai Rp 70.080.360.000,- serta Pendampingan kegiatan Program #Bekerja senilai Rp 225.000.000	26.530.508	91.515.557
4.	06 Nov 2018	Revisi perbaikan detail dan Akun Belanja untuk optimalisasi realisasi anggaran program #Bekerja	91.515.557	91.515.557
5.	30 Nov 2018	Revisi ralat halaman III Dipa	91.515.557	91.515.557
6.	18 Des 2018	Revisi hibah luar negeri langsung (ACIAR) senilai Rp 348.846.000,-	91.515.557	91.864.403

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018**